



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI RANPERDA DAN REGISTRASI RANPERDA ON LINE (SAMEERO)

NAMA : R. GANI MUHAMAD, SH, MAP

N I P : 19690818 199603 1 001

KELAS : A

N D H : 09

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

Tujuan implementasi proyek perubahan ini adalah untuk membangun sistem informasi yang menjadi basis data dan layanan strategis Kemendagri terkait Tata Kelola Monitoring Evaluasi Raperda dan Register Ranperda yang menjadi kebutuhan strategis para stakeholders. Hal ini didasari oleh realitas bahwa kebutuhan akan penyediaan informasi mengenai positioning ranperda yang tengah dilakukan evaluasi oleh Komponen di Kemendagri sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan pendekatan mind mapping, selanjutnya dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan pokok dalam penyelenggaraan Tata Kelola Monitoring Evaluasi Raperda dan Register Ranperda yaitu antara lain meliputi : 1) Belum tersedianya sistem yang dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai positioning secara online proses pelaksanaan evaluasi produk hukum di masing-masing komponen; 2) Pemberian Nomor Register Perda masih bersifat manual melalui media surat-menyurat dan lampiran fisik dari produk hukum yang harus disampaikan secara riil; 3) Tidak tersedianya informasi mengenai berapa jumlah perda yang telah disusun dan dievaluasi.

Kondisi eksisting tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan peran dari sistem informasi dalam memberikan akses kepada pengguna informasi dapat diperkuat sehingga lebih menjamin layanan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan umum, pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang tugas pokok kementerian, harmonisasi terhadap pengkajian produk hukum dan kebijakan pemerintahan daerah, pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum, pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum, perumusan peraturan perundang-undangan antar instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan kordinasi fasilitasi atau evaluasi produk hukum daerah untuk pemberian nomor register produk hukum daerah berdasarkan hasil fasilitasi atau evaluasi.

Hasil implementasi proyek perubahan menunjukkan adanya beberapa kendala terkait dengan pembangunan dan ujicoba Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Raperda dan Register Ranperda On Line (Aplikasi SAMERRO) tingkat nasional yang dapat diklasifikasikan dalam kategori tata kelola dan teknis, namun adanya dukungan dari berbagai stakeholders baik internal maupun eksternal secara integral sebagai *promoters* telah mendukung keberhasilan dari proyek perubahan dengan pencapaian output adalah finalisasi dan penyempurnaan prototype aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Raperda Dan Register Ranperda On Line (APLIKASI SAMERRO) menjadi aplikasi yang siap digunakan serta pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengakses sistem informasi Monitoring Evaluasi Raperda dan Register Ranperda On Line.